

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Factors Influencing Original Local Government Revenue of Regency/City in Gorontalo Province

Rahendra Satria Jati dan Wartono

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret
rahendrasatria@gmail.com

ABSTRACT

With the implementation of regional autonomy, local government is expected to manage their revenue with prudent, accurate, and care. Local government should ensure that all potential revenue has been collected and are accounted for, accountably and transparently. Law No.33/2004 stated that Original Local Government Revenue (OLGR) is a part of regional revenue source. PAD is also projected to become the foundation to wholly fund government expenses and development in an autonomous region in Indonesia. The research aims to identify factors which influence Original Local Government Revenue (OLGR), with the independent variable of Gros Regional Domestic Product (GRDP), capital expense, and total population, to the dependent variable of Original Local Government Revenue (OLGR) of regency/city in Gorontalo Province. Population in the research are regencies/city in Gorontalo Province during 2012 to 2016. The sample is collected by purposive sampling method with 30 samples acquired. Data used in the research is secondary data obtained from the website of DJPK Depkeu RI and BPS Gorontalo Province. Hypothesis test in the research uses double regression analysis model which is transformed into natural logarithm (ln). Research result based on t-test shows that Gros Regional Domestic Product (GRDP) has the positive and significant impact to OLGR, while capital expenditure has no impact to OLGR, and total population has a negative to OLGR of regency/city in Gorontalo Province. In addition, F-test shows that variables of GRDP, capital expense, and total population simultaneously have a significant impact on Original Local Government Revenue (OLGR) of regencies/city in Gorontalo Province.

Keyword: regional original revenue (olgr), gros regional domestic product (grdp), capital expense, and total population

PENDAHULUAN

Adanya pemberlakuan otonomi daerah serta ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka Pemda memiliki wewenang yang cukup luas dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan seluruh masyarakat setempat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola hasil pendapatan asli daerahnya, untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kinerjanya (Harumiati, 2015:87). Dijelaskan juga oleh Soleh dan Rochmansjah (2010, dalam Atmaja, 2011: 2) bahwa dalam konteks otonomi dan desentralisasi sumber penerimaan daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, sedangkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil. Dengan Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui DAU justru menjadikan ketergantungan pemda terhadap pemerintah pusat semakin besar .

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini yaitu masih belum menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan tujuan dari otonomi daerah, selain itu penda juga belum dapat melaksanakan desentralisasi dengan baik terutama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal didaerah. Menurut Prawirosetoto dalam Pujiati (2006) desentralisasi fiskal terdiri dari aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran daerah, dan yang menjadi tolok ukur dari desentralisasi fiskal tersebut adalah pendapatan asli daerah (PAD). Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di berbagai daerah saat ini menjadi suatu hal yang kontras dengan tujuan di laksanakan otonomi daerah yaitu diharapkan daerah yang mandiri dan sejahtera. Hal tersebut menjadi salah satu fenomena yang sering kita lihat saat ini dikarenakan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal terutama untuk mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan desentralisasi fiskal perlu ditingkatkan dan diupayakan secara optimal agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien untuk membiayai pembangunan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan akan berdampak terhadap turunnya angka kemiskinan. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peningkatan PAD tidak hanya dari aspek pajak maupun retribusi daerah saja tetapi juga perlu mendorong kinerja dari BUMD untuk dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan didaerah

Pendapatan asli daerah (PAD) sangat dipengaruhi oleh empat elemen penting yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, selain dari empat elemen tersebut PAD dapat juga dipengaruhi oleh faktor atau unsur lain yang merupakan suatu kondisi yang ada di daerah tersebut seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja modal serta jumlah penduduk. Menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi parameter untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, yang didasarkan atas harga yang berlaku maupun harga secara konstan. PDRB merupakan keseluruhan hasil unit usaha yang akan menjadi nilai tambah pada suatu daerah tertentu, atau keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi dalam suatu daerah. Dengan kondisi tersebut diyakini bahwa dengan meningkatnya PDRB suatu daerah juga dapat mempengaruhi peningkatan PAD. Pendapat ini juga sejalan dengan pernyataan (Halim, 2000 dalam Adriyani dkk, 2008:2).

Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan saat ini, karena dengan adanya belanja modal terutama dalam hal pembangunan infrastruktur baik berupa bangunan atau jalan diharapkan perekonomian didaerah semakin meningkat sehingga hal ini berpengaruh juga terhadap bertambahnya pendapatan pemerintah daerah. Belanja modal dapat memberikan kontribusi dalam jangka waktu satu tahun anggaran maupun dalam jangka waktu yang panjang tergantung jenis belanja modal dan ketepatan waktu mulai dari proses pengadaan sampai dengan serah terima barang. Dalam penelitian ini berfokus terhadap belanja modal secara keseluruhan.

Mayza dkk (2015) berpendapat bahwa pendapatan asli daerah sangat berhubungan dengan jumlah penduduk, yang berarti bahwa semakin besar penduduk yang memiliki

pekerjaan maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap PAD. Selain penduduk menjadi salah satu faktor dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Provinsi Gorontalo terdiri dari satu kota dan lima kabupaten yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara. Masing-masing daerah memiliki ciri khas masing-masing seperti keragaman budaya dan bahasa. Dengan kekayaan alam dan besarnya potensi dari berbagai sektor yang dimiliki oleh Provinsi Gorontalo tersebut ternyata tidak diikuti dengan kesejahteraan yang dimiliki penduduknya. Menurut data dari BPS per September 2016, berdasarkan persentase penduduk miskin di seluruh Provinsi di Indonesia, Provinsi Gorontalo menduduki posisi kelima setelah Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku dengan persentase 17,63%.

PAD yang dihasilkan Provinsi Gorontalo antara tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 terus meningkat dan kearah yang positif, tetapi untuk retribusi daerah menunjukkan nilai yang fluktuatif serta adanya penurunan yang sangat signifikan yang terjadi di tahun 2014 sedangkan untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2016 sehingga pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk memperbaiki kinerja keuangannya serta melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi pendapatan asli daerahnya karena apabila tidak segera dievaluasi dan ditangani dengan cepat dan tepat maka kondisi tersebut dapat berdampak negatif dalam upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Pemerintah Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki Pendapatan Daerah yang cukup besar, tetapi besarnya kontribusi pendapatan tersebut terdapat pada pendapatan transfer yaitu sebesar 81,76% dari keseluruhan pendapatan daerah yang didapatkan, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 8,70% dari total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Menurut Insukindro, dkk (1994:1, dalam Rinaldi 2011: 106) salah satu indikator ketergantungan suatu daerah dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerahnya. Pada dasarnya, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi PAD yang dihasilkan terhadap APBD.

Penelitian ini merupakan replikasi serta pengembangan dari penelitian Asmuruf dkk (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. Sampel digunakan yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2013 dan untuk variabel PDRB berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000. Adapun perbedaan dengan penelitian ini antara lain: (1) Obyek penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo; (2) Penambahan variabel independen yaitu belanja modal; (3) Periode penelitian ini adalah selama 5 tahun untuk tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2016; dan (4) Perhitungan PDRB yang digunakan berdasarkan atas dasar harga konstan terbaru yaitu tahun 2010.

Penelitian terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dengan variabel PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian dari Asmuruf dkk (2015) memberikan hasil empiris bahwa PDRB tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD sedangkan variabel jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong. Penelitian dari Adriani dkk (2008) memberikan hasil empiris bahwa PDRB secara signifikan dan positif mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk memiliki

hubungan yang negatif dan secara parsial pengaruhnya tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Merangin selama periode 1991/2006. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian dimana hasil tersebut tidak harus disamakan atau digeneralisasi untuk daerah lain, karena disebabkan adanya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain obyek penelitian, periode penelitian dan metode yang digunakan.

Mayza dkk (2015) tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD sedangkan variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD. Prana (2016) tentang Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel konsumsi, PDRB, jumlah penduduk secara signifikan dan positif mempengaruhi PAD di Kota Tebing Tinggi, sedangkan variabel Retribusi memiliki arah yang negatif dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tebing Tinggi

Rani (2014) tentang Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) studi kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005-2014 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel PDRB secara positif dan signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/kota Eks-Karesidenan Pekalongan, Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan

Penelitian dari Batik (2013) tentang Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi, PDRB dan penerimaan pembangunan secara signifikan dan positif mempengaruhi PAD sedangkan variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian dari Darwanis (2014) tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Berdasarkan kondisi yang sudah diungkapkan di atas serta adanya perbedaan terhadap hasil penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan bukti empiris apakah PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Penulis juga memahami pentingnya pendapatan asli daerah terhadap keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai kemandirian daerah, untuk itu perlu adanya perhatian oleh pemerintah daerah terhadap beberapa hal yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berkaitan dengan penelitian, artikel ini akan membahas antara lain landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan.

LANDASAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang menunjukkan suatu daerah memiliki kemampuan dalam mendapatkan sumber dana sebagai pembiayaan atas kegiatan rutin dan pembangunan pemerintah daerah. Sedangkan Halim (2007) menjelaskan bahwa PAD merupakan penerimaan daerah yang didapatkan melalui sumber ekonomi yang berasal dari daerah itu sendiri, yang dikelompokkan kedalam empat kategori pendapatan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

PAD menurut Widjaja (2002, dalam Prana, 2016: 75) adalah pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang berupa pembagian laba, dividen dan hasil penjualan saham milik daerah, serta berupa pinjaman lainnya. Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari usaha pemda dalam menggali potensi serta memanfaatkan aset yang dimiliki daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka untuk membiayai urusan rumah tangganya

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB menurut Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan hasil unit usaha yang akan menjadi nilai tambah pada suatu daerah tertentu, atau keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi dalam suatu daerah. Menurut Mankiw (2003:522, dalam Asmuruf dkk, 2015:732) PDRB merupakan total pendapatan yang diperoleh secara domestik, termasuk didalamnya merupakan pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang dimiliki oleh asing, total pengeluaran terhadap barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Atau keseluruhan nilai pasar barang dan jasa final yang diproduksi dalam periode tertentu.

Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan belanja modal adalah belanja pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut Sularso dan Restianto (2011), belanja modal adalah pengeluaran oleh pemda yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran serta menambah kekayaan suatu daerah yang berdampak pada peningkatan belanja rutin. Sedangkan pendapat serupa juga dikemukakan oleh Halim (2004: 73, dalam Darwanis dkk, 2014:184) yang berpendapat bahwa belanja modal adalah belanja pemda yang manfaatnya melampaui satu tahun anggaran serta menambah kekayaan suatu daerah yang berdampak pada peningkatan belanja rutin misalnya biaya pemeliharaan yang berada dikelompok belanja administrasi umum.

Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia dalam periode minimal enam bulan atau lebih dan yang bertempat tinggal kurang dari enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Menurut Simanjuntak (2001, dalam Asmuruf dkk, 2015: 732) Jumlah penduduk merupakan sekelompok orang yang menempati suatu daerah atau Negara serta mematuhi aturan dari daerah atau Negara tersebut. jumlah penduduk mempengaruhi PAD karena jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka jumlah wajib pajak dan pengguna fasilitas publik juga akan meningkat sehingga sehingga dapat meningkatkan pungutan retribusi daerah yang berdampak pada meningkatnya PAD.

Hubungan Antara PDRB Dengan PAD

Penjelasan dari Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi parameter untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah sehingga dengan meningkatnya PDRB suatu daerah menunjukkan bahwa usaha yang ada di daerah tersebut terus meningkat yang kemudian diikuti adanya peningkatan per kapita daerah tersebut sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah, bagi para pengusaha tempat makan, hiburan, hotel dapat memberikan kontribusi diberbagai sektor seperti pajak dan retribusi yang secara makro dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Sehingga dengan meningkatnya PDRB mengindikasikan akan mendorong adanya peningkatan PAD (Saragih, 2003, dalam Adriani dkk, 2008)

Hubungan Antara Belanja Modal Dengan PAD

Belanja modal memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan PAD. Belanja modal juga dapat memberikan kontribusi secara jangka panjang karena dengan adanya belanja modal baik berupa bangunan, jalan, peralatan mesin dll maka pemerintah daerah mendapatkan pemasukan pada PADnya yang berasal dari pajak misalnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dll, untuk pendapatan retribusi bisa berupa retribusi parkir, retribusi izin gangguan, retribusi mendirikan bangunan dll.

Dibangunnya infrastruktur jalan, gedung pasar, terminal, taman kota maka secara bersamaan akan membuka akses dan peluang bagi para pelaku usaha, masyarakat maupun investor untuk membangun usaha seperti restoran, hotel, perumahan, bengkel, tempat hiburan dll yang kemudian juga akan berdampak pada BUMD atau perusahaan daerah terutama di bidang jasa keuangan dalam meningkatkan jumlah nasabah baik sebagai kreditur maupun debitur sehingga BUMD maupun perusahaan daerah dapat meningkatkan laba mereka yang kemudian akan memberikan kontribusi terhadap PAD yang berupa dividen kepada pemerintah daerah. Menurut Darwanis dkk (2014) PAD dapat ditingkatkan melalui pungutan yang berasal dari retribusi dan pajak atas pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun sebagai bentuk pelayanan publik yang bersumber dari anggaran belanja modal yang telah dialokasikan dalam APBD

Hubungan Jumlah Penduduk dengan PAD

Wirosardjon (1998, dalam Asmuruf dkk, 2015:732) mengatakan bahwa ledakan jumlah penduduk yang terjadi di negara berkembang akan menghubungkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Hubungan tersebut tergantung sifat dan masalah terkait kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, sehingga masing-masing negara atau daerah akan, memiliki masalah kependudukan dan potensi serta tantangan yang khas. Sedangkan menurut Atmaja (2007, dalam Mayza dkk, 2015:12) menyatakan bahwa pendapatan akan meningkat apabila adanya peningkatan jumlah penduduk namun pendapatan secara proposional tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara jumlah penduduk dengan tingkat pendapatan asli daerah yang didapatkan, karena dengan jumlah penduduk yang besar maka diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak maupun retribusi daerah yang sudah ditetapkan. Dengan jumlah penduduk yang semakin besar dan diikuti kemampuan finansial yang mereka miliki maka jumlah konsumsi yang dilakukan oleh penduduk disuatu daerah juga akan

semakin besar misalnya dengan banyaknya acara hiburan yang diadakan dapat memberikan pendapatan daerah melalui retribusi baik ijin gangguan maupun retribusi parkir, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka diikuti pula dengan meningkatnya akan kebutuhan tempat tinggal sehingga memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik retribusi yang berkaitan dengan ijin mendirikan bangunan, makanan yang mereka konsumsi di restoran juga dapat membantu pemerintah untuk menambah pendapatan mereka melalui pajak restoran yang dibayar oleh masyarakat dalam setiap produk yang mereka beli.

Pengembangan Hipotesis

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada penelitian ini variabel PDRB diukur atau dinilai berdasarkan harga konstan tahun 2010 karena penilaian harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dan tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rani (2014) yang memberikan bukti empiris bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan Batik (2013) juga menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh Positif terhadap pendapatan asli daerah.

Belanja Modal

Salah satu upaya pemda untuk meningkatkan perekonomian dan kemajuan pembangunan suatu daerah adalah melalui belanja modal. Menurut Anggraeni (2016) dalam penelitiannya menjelaskan perlu adanya peran Pemerintah dalam memberikan berbagai fasilitas kemudahan melalui pembangunan infrastruktur untuk menarik para investor karena dengan adanya pembangunan infrastruktur industri memiliki dampak nyata terhadap kenaikan PAD.

Berdasarkan deskripsi tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika belanja modal pemda meningkat maka PAD juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) dan Darwanis dkk (2014) dengan hasil penelitian bahwa adanya pengaruh positif antara belanja modal daerah terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Jumlah Penduduk.

Santosa dan Rahayu (2005, dalam Rani, 2014) menyatakan dengan tingginya pertumbuhan penduduk dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan *output* melalui peningkatan ekspansi pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan menurut Bhaskara dan Bagus (2014, dalam Hendriyani, 2017:3) salah satu komponen penentu adanya disparitas PAD adalah jumlah penduduk. Peningkatan penduduk juga dapat memberikan rangsangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang berarti bahwa semakin besar jumlah penduduknya maka PAD yang dihasilkan juga dapat meningkat. Pernyataan tersebut juga didukung oleh

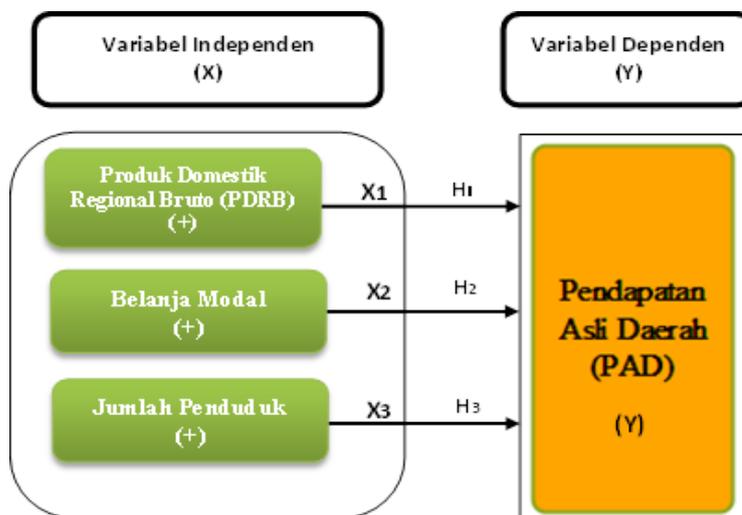
penelitian Asmuruf dkk (2015) dan Hendriyani (2017) yang memberikan bukti empiris bahwa memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan pengembangan hipotesis maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan merupakan data runtut waktu (*time series*). Penelitian ini menguji pengaruh PDRB, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selama lima tahun dari tahun 2012 s.d. 2016. Pengambilan sampel ditetapkan dengan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*). Dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo yang mengirimkan data berupa LKPD tahun 2012-2016 ke DJPK Depkeu RI. Kabupaten/Kota terdiri dari Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato.
2. Data variabel independen (produk domestik bruto, belanja modal, dan jumlah penduduk) tersedia dan dapat diperoleh

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS 23. Analisis data menggunakan Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linear Regression*). Persamaan regresi berganda dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e_t$$

di mana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Produk Domestik Regional Bruto

- X_2 = Belanja Modal
 X_3 = Jumlah Penduduk
 β_0 = Konstanta
 β_1, \dots, β_3 = Koefisien Regresi
 e_t = Term of Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari website BPS Provinsi Gorontalo dan DJPK Depkeu RI. Adapun data yang digunakan adalah jumlah penerimaan PAD, Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk Daerah 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dari tahun 2012-2016, maka didapat jumlah sampel sebesar 30 sampel

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Data realisasi PAD yang menjadi sampel per kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016 dalam ribuan rupiah

No	Kab/Kota	Pendapatan Asli Daerah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	23.638.470,05	26.078.770,50	37.352.461,97	43.432.090,35	48.794.270,89
2	Kab. Gorontalo	50.683.527,05	42.224.468,98	105.365.567,59	113.221.503,04	125.271.076,53
3	Kota Gorontalo	84.349.037,04	134.378.892,25	124.732.780,26	142.700.996,25	172.315.775,60
4	Kab. Pohuwato	18.912.194,62	42.961.040,89	38.888.554,94	46.935.267,85	62.981.898,28
5	Kab. Bone Bolango	15.949.603,07	15.146.211,25	44.670.045,83	54.420.838,97	62.079.454,19
6	Kab. Gorontalo Utara	9.357.736,09	12.847.448,00	20.958.450,36	25.267.837,56	24.586.696,15
Total		202.890.567,91	273.636.831,86	371.967.860,94	425.978.534,02	496.029.171,64

Sumber: Data diolah Peneliti 2018, dari DJPK Depkeu

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana PAD terendah dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2012 dengan nilai PAD sebesar Rp 9.357.736.087,- sedangkan PAD tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016 dengan nilai PAD sebesar Rp 172.315.775.595,-

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB yang menjadi sampel per kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Data PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016 dalam ribuan rupiah

No	Kab/Kota	Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	2.213.391.100	2.378.894.450	2.552.687.550	2.715.277.420	2.885.951.710
2	Kab. Gorontalo	5.594.792.600	6.027.132.430	6.495.462.110	6.905.553.630	7.362.609.080
3	Kota Gorontalo	3.743.752.930	4.039.670.430	4.360.214.630	4.675.546.790	5.022.093.310
4	Kab. Pohuwato	2.919.368.900	3.143.289.450	3.372.704.020	3.577.847.000	3.815.587.090
5	Kab. Bone Bolango	1.975.880.410	2.126.544.910	2.290.622.340	2.439.896.400	2.601.239.470
6	Kab. Gorontalo Utara	1.432.876.710	1.535.436.810	1.645.678.530	1.765.866.770	1.896.424.680
Total		17.880.062.650	19.250.968.480	20.717.369.180	22.079.988.010	23.583.905.340

Sumber: Data diolah Peneliti 2018, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa PDRB di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ketahun dimana PDRB terendah dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2012 dengan nilai PDRB sebesar Rp 1.432.876.710.000,- sedangkan PDRB tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016 dengan nilai PDRB sebesar Rp 7.362.609.080,000,-

Data Belanja Modal

Data belanja modal yang menjadi sampel per kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016 dalam ribuan rupiah

No	Kab/Kota	Belanja Modal				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	93.604.754,57	139.843.376,81	173.701.621,94	205.373.763,92	187.569.053,86
2	Kab. Gorontalo	229.758.490,60	131.412.842,12	148.576.860,33	192.553.381,37	192.888.815,09
3	Kota Gorontalo	64.055.590,17	123.279.120,36	75.991.573,69	138.591.043,55	178.066.247,06
4	Kab. Pohuwato	88.347.579,16	154.415.478,78	125.319.945,58	177.287.115,03	190.126.603,64
5	Kab. Bone Bolango	88.616.280,22	155.418.569,55	121.611.693,37	128.547.593,10	159.410.900,48
6	Kab. Gorontalo Utara	114.474.583,55	116.326.085,83	100.955.233,78	134.080.339,12	156.550.734,73
Total		678.857.278,26	820.695.473,45	746.156.928,69	976.433.236,08	1.064.612.354,85

Sumber: Data diolah Peneliti 2018 dari DJPK Depkeu

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal selama tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami fluktuatif dimana realisasi belanja modal terendah dihasilkan oleh Kota Gorontalo pada Tahun 2012 yaitu sebesar Rp 64.055.590.173,- sedangkan realisasi belanja modal tertinggi dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2012 dengan nilai belanja modal sebesar Rp 229.758.490.596,-

Data Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk yang menjadi sampel per kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sepanjang tahun 2012-2016 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5 Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Boalemo	137.476	141.547	145.580	149.832	154.008
2	Kab. Gorontalo	363.146	365.781	368.149	370.441	372.856
3	Kota Gorontalo	189.476	193.692	197.970	202.202	206.454
4	Kab. Pohuwato	136.324	139.675	143.338	146.896	150.385
5	Kab. Bone Bolango	146.773	148.971	151.094	153.166	155.238
6	Kab. Gorontalo Utara	107.092	108.324	109.502	110.700	111.824
Total		1.080.287	1.097.990	1.115.633	1.133.237	1.150.765

Sumber : Data diolah Peneliti 2018, dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo semakin meningkat dari tahun ketahun dimana jumlah peduduk terendah terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2012 dengan jumlah penduduk sebesar 107.092 sedangkan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2016 dengan jumlah penduduk sebesar 372.856

Hasil Analisis

Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif diperoleh informasi bahwa variabel dependen atau terikat berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel indpenden antara lain PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk serta jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian (N) sebanyak 30 observasi:

Tabel 6 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PDRB	30	1.432.876.710.000	7.362.609.080.000	3.450.409.788.667	1.672.519.624.746
Belanja Modal	30	64.055.590.173	229.758.490.596	142.891.842.377	40.977.732.685
Jml_Penduduk	30	107.092	372.856	185.930	87.034
PAD	30	9.357.736.087,76	172.315.775.595,42	59.016.765.546	44.828.937.862
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Selama jangka waktu lima tahun jumlah PAD terbesar yaitu Rp 172.315.775.595,42 ,- yang dihasilkan pada tahun 2016 oleh Kota Gorontalo. Sedangkan jumlah PAD terkecil, yaitu Rp 9.357.736.087,76 ,- dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012. Salah satu penyebabnya dikarenakan Kabupaten Gorontalo Utara adalah salah satu kabupaten baru yang masih berkembang dan merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2007. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab kecilnya jumlah PAD yang diperoleh. PAD yang diterima selama 5 tahun (tahun 2012-2016) rata-rata sebesar Rp 59.016.765.545,63 dengan standar deviasi sebesar Rp 44.828.937.861,52

Berdasarkan statistik deskriptif hasil PDRB terbesar dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016, yaitu Rp 7.362.609.080.000,-. Sedangkan PDRB terendah dihasilkan oleh Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 1.432.876.710.000,-. Rata-rata PDRB adalah sebesar Rp 3.450.409.788,67 dengan standar deviasi Rp 1.672.519.624.746,38. Belanja modal terbesar yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di Gorontalo selama periode tahun 2012-2016 adalah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 sebesar Rp 229.758.490.596,-. Sedangkan pengeluaran belanja modal daerah terkecil adalah sebesar Rp 64.055.590.173,- oleh Kota Gorontalo pada tahun 2012. Rata-rata pengeluaran untuk belanja modal adalah sebesar Rp 142.891.842.377,83 dengan standar deviasi Rp 40.977.732.684,53.

Jumlah penduduk terbesar yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2012-2016 sebesar 372.856 jiwa yang berada di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah sebesar 107.092 jiwa terdapat di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 karena Gorontalo Utara merupakan

Kabupaten yang baru terbentuk hasil dari pemekaran Kabupaten Gorontalo. Rata-rata jumlah penduduk di Gorontalo adalah sebesar 185.930,4 jiwa dengan standar deviasi 87.034,13. Dalam uji normalitas pada penelitian ini sebelum dilakukan normalisasi data, hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan asymp sig sebesar 0,13 atau dibawah 0,05, sehingga belum dapat dikatakan lolos untuk uji asumsi klasik. Untuk itu peneliti melakukan transformasi data dengan logaritma natural (\ln) dalam rangka untuk menormalisasikan data penelitian. Pada uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* juga memberikan hasil bahwa tidak terdapat korelasi negatif dan hasilnya tidak ada keputusan atau no decision, seharusnya hasil yang ditunjukkan adalah tidak terdapatnya autokorelasi baik positif maupun negatif sehingga peneliti menggunakan alternatif pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *run test*. Hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Kesimpulan
Normalitas	Hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan test statistic sebesar 0.63 dengan asymp sig (2-tailed) sebesar 0,200 ($0,200 > 0,05$)	Lolos Uji Normalitas
Multikolinearitas	Seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance kurang dari 0.10 dan $VIF < 10$	Lolos Uji Multikolinearitas
Heteroskedatisitas	grafik Scatterplot titik-titik tersebar tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu	Lolos Uji Heteroskedatisitas
Autokorelasi	Hasil uji <i>run test</i> menunjukkan nilai Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 1,00 $> 0,05$	Lolos Autokorelasi

Sumber : Output SPSS 23, 2018

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat yang memiliki nilai nol dan satu. Semakin kecil Koefisien determinasi maka variabel bebas belum dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat, sebaliknya apabila nilainya mendekati satu maka variabel bebas dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan pada variabel terikat. Hasil pengujian Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
1	,853	,695	,43195

Sumber : Output SPSS 23, 2018

Hasil dari uji koefisien determinasi menunjukkan adjustment R square sebesar 0,695 yang berarti 69,5% variasi atau perubahan dalam PAD dapat dijelaskan oleh variabel independen PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar (100%-69,5% = 30,5%) dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan dengan maksud untuk menguji apakah variabel independen secara keseluruhan dan bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau terikat.

Tabel 9 Hasil Uji F

Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	12,918	3	4,306	23,079	,000
	Residual	4,851	26	,187		
	Total	17,770	29			

Sumber: Output SPSS 23, 2018

Tabel 9 menunjukkan hasil uji signifikansi F sebesar 23,079 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan PAD Provinsi Gorontalo.

Uji Hipotesis

Penelitian ini peneliti menguji hipotesis dengan menggunakan uji signifikan parameter individual (Uji *t*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang secara individu dapat menerangkan variasi dari variabel terikat. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan hasil uji *t* dengan signifikansi 5% atau 0,05, yang berarti apabila hasil asymp.sig menghasilkan nilai > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat, sebaliknya apabila hasil asymp.sig menghasilkan nilai < 0,05 maka variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari uji *t* dapat dilihat pada tabel 10:

Tabel 10 Hasil Uji Signifikan *t*

Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig
		B	Std. Error		
1	(Constant)	-25,795	3	-2,847	,009
	Ln_PDRB	2,282	26	5,238	,000
	Ln_BM	-,060	29	-,219	,829
	Ln_JP	-1,145		-2,225	,035

Sumber : Output SPSS 23, 2018

Dari hasil uji signifikan *t* diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnPAD} = -25,795 + 2,282 \text{ LnPDRB} - 0,060 \text{ LnBM} - 1,145 \text{ LnJP}$$

Berdasarkan hasil uji *t* menunjukkan bahwa variabel PDRB memiliki *t* hitung sebesar 5,238 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05 (5%). Dengan demikian *t* hitung > *t* tabel atau 5,238 > 2,056, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh PDRB terhadap pendapatan Asli daerah (PAD) dan menyatakan bahwa Hipotesis (H_1) diterima dan (H_0) ditolak. PDRB secara signifikan mempengaruhi peningkatan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.

Variabel belanja modal memiliki *t* hitung -0,219 dengan nilai signifikansi 0,829 (82,9%) diatas signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian *t* hitung < *t* tabel atau 0,219 < 2,056. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil tersebut juga menyatakan bahwa hipotesis (H_2) ditolak dan (H_0) diterima.

Variabel jumlah penduduk memiliki *t* hitung -2,225 dengan nilai signifikansi 0,035 (3,5%) dibawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian -*t* hitung < -*t* tabel atau -2,225 < -2,056. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk secara signifikan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil tersebut juga membuktikan bahwa hipotesis (H_3) diterima dan (H_0) ditolak.

Pembahasan

Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji persamaan regresi yang diperoleh melalui program SPSS 23, hasil uji *t* pada variabel PDRB memberikan hasil nilai signifikansi uji statistik (p-value) sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan uji adalah menolak H_0 , jadi dapat disimpulkan bahwa PDRB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo. Berpengaruhnya PDRB terhadap PAD secara positif dan signifikan didukung dengan data yang berdasarkan dari BPS yang menunjukkan bahwa PDRB di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo yang terus meningkat dan diikuti juga dengan meningkatnya PAD antara tahun 2012 sampai dengan 2016 baik dari sektor pajak daerah maupun retribusi daerah. Meningkatnya PDRB maupun PAD karena dipengaruhi besarnya kontribusi pendapatan yang diperoleh dari berbagai sektor barang dan jasa yang beredar di wilayah Provinsi Gorontalo, dimana kontribusi terbesar berada pada sektor tersier yaitu sebesar 45,12% dari total PDRB Kabupaten/Kota se-Gorontalo.

Hasil penelitian ini konsisten dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adriani dkk (2008) yang menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Mayza dkk (2015) menyimpulkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan hasil dari Penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Prana (2016) bahwa "PDRB secara signifikan dan positif mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah".

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji persamaan regresi yang diperoleh melalui program SPSS 23 terhadap 30 sampel, hasil uji pada variabel belanja modal menunjukkan bahwa variabel belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurang berpengaruhnya belanja modal terhadap peningkatan PAD disebabkan karena kurang optimalnya pencapaian target belanja modal oleh Pemda bahkan memiliki dampak yang negatif terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan besarnya realisasi belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo masih terbilang rendah dengan realisasi rata-rata sebesar 84.01% dimana realisasi belanja modal Kota Gorontalo menjadi yang terendah dibanding dengan kabupaten yang lainnya yaitu dengan rata-rata sebesar 75,40%. Pemanfaatan belanja modal untuk program yang kurang strategis seperti alokasi untuk pembelian mobil dinas, pembelian peralatan kantor dan pembangunan gedung kantor yang dirasa belum diperlukan juga menjadi salah satu penyebab minimnya dampak yang dihasilkan terhadap PAD

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian dari Darwanis dkk (2014) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh belanja modal terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2016) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh variabel belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di pada Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil nilai statistik uji t dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Gorontalo secara parsial. Dampak negatif yang ditunjukkan berdasarkan hasil uji statistik dikarenakan masih banyaknya penduduk yang berpenghasilan rendah ditambah dengan penduduk yang tidak bekerja sehingga kondisi tersebut rentan dengan kemiskinan yang membuat penduduk di Provinsi Gorontalo sulit untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah seperti membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang akan berdampak pada upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo..

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Adriani dkk (2008) bahwa jumlah penduduk berhubungan negatif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah". Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Asmuruf dkk (2015) yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota sorong

Pengaruh PDRB, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil uji signifikansi F didapatkan hasil PDRB, belanja modal dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di wilayah provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Adriani dkk (2008) yang menyatakan bahwa PDRB dan jumlah penduduk mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan PAD Kabupaten Merangin dan Sari dkk (2014) yang menyatakan bahwa secara simultan pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk produktif dan produk domestik regional bruto secara positif dan signifikan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Morowali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengujian analisis regresi yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) Jumlah Penduduk secara signifikan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan (4) Secara Simultan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menjadi kajian yang bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan di sektor pembangunan yang utamanya agar alokasi belanja modal dapat dimanfaatkan secara tepat untuk membiayai pembangunan yang bersifat strategis dan berdampak bagi peningkatan PAD yang berimbas bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
2. Bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan pengetahuan pentingnya PAD untuk kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan berperan serta dalam mensukseskan pembangunan dan bersinergi untuk memajukan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Bagi Peneliti lain diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan menambah pengetahuan terutama dalam hal terkait pendapatan asli daerah (PAD).

Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan data yang diperoleh dari website DJPK Depkeu RI dan BPS Provinsi Gorontalo sebagai layanan penyedia data, tidak berasal dari pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang diteliti secara langsung dan sampel yang digunakan juga sangat terbatas yaitu 30 sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

- Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi..* Yogyakarta: UPP UMP YKPN.
Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Research Methods for Bussiness*. USA: Wiley and Sons Ltd.
Prana, Riandani R. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, Vol. 4, No.1, Februari hal 74-86.
Adriani, Evi dan Sri I. H. 2008. Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 8, No 2, Juli, hal 1-6.
Mayza, Miragusta, Raja M & Muhammad N. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, No 1, Februari, hal 9-16.
Asmuruf, Makdalena F, Vikie. A. R, & George. M. V. K 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 15, No 5, hal 727-737.
Fitria S. E. R, Hening 2014. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Batik, Karlina 2013. Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No 1, Juni, hal 115-140.
Darwanis & Ryanda S. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap PAD dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemda (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 1, No. 2, September, Hal. 183-199.
Atmaja, Arief E. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Dewa Gde Bisma, I & Hery S. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara edisi khusus Vol. 4, No. 3, Desember, Hal. 75-86.
Sularso, H. & Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. *Riset Akuntansi*. Universitas Jenderal Soedirman.
Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Eksos* Vol. 8, No. 2, Juni, Hal. 105-113.

- Nurhayati. 2015. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 4, No. 1, Januari, Hal. 55-66.
- Harumiyati, Yayuk. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2016. *Publikasi BPS*. Provinsi Gorontalo Dalam Angka. Melalui <https://gorontalo.bps.go.id/>.
- Ghozali, Imam. 2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Idris, Muhammad. 2017. *Penduduk Miskin Tertinggi di Papua, Kalimantan Terendah*. Melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3386708/bps-penduduk-miskin-tertingi-di-papua-kalimantan-terendah>.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/>
- <https://gorontalo.bps.go.id/>
- <http://www.bi.go.id>